

**PERBANDINGAN KONSEPSI SOVEREIGN WEALTH FUND
ANTARA LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
DAN TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED
INTISARI
Wiweko Rahadian Abyapta,¹ M. Hawin²**

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk: 1) menganalisis keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berdasarkan konsepsi *sovereign wealth fund* (SWF); 2) membandingkan konsepsi Temasek Holdings (Private) Limited (Temasek) dengan LPI untuk mempelajari praktik terbaik dari Temasek yang dapat diterapkan bagi LPI; dan 3) merumuskan praktik terbaik bagi pengelolaan LPI.

Penulisan Hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dan perbandingan hukum. Penelitian normatif meneliti hukum berdasarkan perspektif doktrinal dengan objek penelitian norma hukum, sedangkan perbandingan hukum adalah penelitian hukum berdasarkan perbandingan antara dua objek penelitian atau lebih secara luas. Lebih lanjut, Penulisan Hukum ini menggunakan perbandingan hukum mikro yang secara spesifik mengkaji lembaga atau permasalahan hukum antara dua atau lebih yurisdiksi yang berbeda.

Penulisan Hukum ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) LPI memenuhi kualifikasi sebagai SWF yang menjadi katalisator investasi asing di berbagai proyek infrastruktur pemerintah; 2) LPI berperan sebagai *crowding-in* sedangkan Temasek berperan sebagai *reinforcing*, namun berubah menjadi SWF yang berperan menginvestasikan laba dari BUMN kepada aset luar negeri pada peralihan milenium; serta LPI dibentuk secara *sui generis* sedangkan Temasek dibentuk sebagai BUMN yang tunduk kepada Companies Act (1967), sehingga pengelolaannya ditentukan melalui AD/ART; dan 3) berdasarkan perbandingan antara LPI dan Temasek maka dapat diambil tiga praktik terbaik dari Temasek yang perlu diterapkan oleh LPI agar lembaga tersebut dapat menjalankan tujuannya secara optimal, yakni: a) adanya keselarasan tujuan operasional antara pemerintah dan organ pengelola SWF; b) memiliki legitimasi politik dan hukum yang kuat; dan c) tata kelola SWF yang berasaskan akuntabilitas yang berkelanjutan.

Kata kunci: *sovereign wealth funds*, hukum investasi, investasi asing, kapitalisme negara, tata kelola, praktik terbaik

¹ Mahasiswa pada Departemen Hukum Bisnis, Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2019, Yogyakarta.

² Guru Besar Hukum Bisnis pada Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

***SOVEREIGN WEALTH FUND CONCEPT COMPARISON
BETWEEN INDONESIA INVESTMENT AUTHORITY
AND TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED
ABSTRACT***

Wiweko Rahadian Abyapta,³ M. Hawin⁴

This Legal Writing aims to: 1) analyse the existence of the Indonesia Investment Authority (INA) based on the concept of sovereign wealth funds (SWF); 2) compare the concept of Temasek Holdings (Private) Limited (Temasek) with INA to infer the best practices from Temasek that can be applied to INA; and 3) formulate the best practices for INA's governance.

This Legal Writing uses normative and legal comparison research methods. Normative research examines law from a doctrinal perspective with research objects on legal norms, whilst legal comparison is a legal research based on a broad comparison between two or more research objects. Furthermore, this Legal Writing uses a micro-comparison method that specifically examines legal institutions or issues between two or more different jurisdictions.

This Legal Writing concludes as follows: 1) INA fulfils the qualifications as an SWF, which is to crowd-in foreign investment in various government infrastructure projects; 2) INA has a crowding-in role while Temasek has a reinforcing role, however at the turn of the millennium it changes to an SWF whose role is to invest profits from SOEs into foreign assets; also a sui generis regulation formed INA while Temasek was formed as an SOE that adheres to the Companies Act (1967) so that its bye-law determines its governance; and 3) based on a comparison between INA and Temasek, there are three best practices that can be inferred from Temasek that need to be implemented by LPI so that the institution can carry out its objectives, namely: a) there should be an alignment of operational objectives between the government and the SWF management organ; b) having a solid political and legal legitimacy; and c) SWF governance that is based on sustainable accountability.

Keywords: sovereign wealth funds, investment law, foreign investment, state capitalism, governance, best practices

³ Student at the Department of Business Law, Undergraduate Programme, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Class of 2019, Yogyakarta.

⁴ Professor of Business Law at Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta.